



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme perlu diselenggarakan sistem merit yang didukung oleh standar kompetensi jabatan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu disusun standar kompetensi jabatan oleh instansi pengguna untuk menempatkan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
8. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan jabatan struktural eselon III.
9. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan struktural eselon IV.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman kompetensi yang dipersyaratkan untuk JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. kesesuaian antara tugas JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan kompetensi pejabat atau calon pengemban Jabatan sehingga tercipta pejabat yang profesional; dan
 - c. peningkatan kompetensi JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta calon pengemban JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. standar kompetensi Jabatan; dan
- b. penggunaan standar Kompetensi Jabatan.

BAB III STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi Jabatan merupakan bagian dari standar kompetensi ASN sebagai persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.
- (2) Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kompetensi Manajerial;
 - b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - c. Kompetensi Teknis.
- (3) Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi kompetensi JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
- (4) Jenis JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dalam hal diperlukan penambahan kompetensi diluar yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat ditambahkan kompetensi lain yang dinilai sangat diperlukan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kompetensi Manajerial

Pasal 5

- (1) Kompetensi Manajerial JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas terdiri atas 8 (delapan) kompetensi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. integritas yaitu, konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya;
 - b. kerja sama yaitu, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi;
 - c. komunikasi yaitu, kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - d. orientasi pada hasil yaitu, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi;
 - e. pelayanan publik yaitu, kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/golongan/partai politik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain yaitu, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya;
 - g. mengelola perubahan yaitu, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggungjawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif; dan

- h. pengambilan keputusan yaitu, kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Bagian Ketiga
Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 6

Kompetensi Sosial Kultural merupakan kemampuan dalam hal sebagai berikut:

- a. mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;
- b. mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; dan
- c. mampu menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Bagian Keempat
Kompetensi Teknis

Pasal 7

Kompetensi Teknis mengacu pada kamus Kompetensi Teknis Pemerintah Daerah yang sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan sebagaimana ditetapkan berdasarkan hasil penyusunan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

BAB IV
PENGUNAAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 8

Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menjadi acuan paling sedikit untuk:

- a. perencanaan Jabatan;
- b. pengisian Jabatan;
- c. pengembangan karir;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penempatan;
- f. promosi dan/atau mutasi;
- g. uji kompetensi;
- h. sistem informasi manajemen; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 17 Mei 2023

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 536

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi:

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;
5. Asisten Administrasi Umum;
6. Inspektur;
7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kemasyarakatan;
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
9. Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik Dan Administrasi Umum;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
11. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Kepala Dinas Kesehatan;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
19. Kepala Dinas Perikanan;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
22. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
23. Kepala Dinas Pendidikan;
24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
26. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
27. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
28. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
29. Kepala Dinas Perhubungan;
30. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

B. Jabatan Administrator, meliputi:

1. Kepala Bagian Pemerintahan (Sekretariat Daerah);
2. Kepala Bagian Pemerintahan (Sekretariat Daerah);
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Daerah);
4. Kepala Bagian Hukum (Sekretariat Daerah);
5. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (Sekretariat Daerah);
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang Dan Jasa (Sekretariat Daerah);
7. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan (Sekretariat Daerah);
8. Kepala Bagian Organisasi (Sekretariat Daerah);
9. Kepala Bagian Umum (Sekretariat Daerah);
10. Kepala Bagian Umum Dan Keuangan (Sekretariat DPRD);
11. Kepala Bagian Pengkajian Perundang - Undangan Dan Persidangan (Sekretariat DPRD);
12. Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran Dan Pengawasan (Sekretariat DPRD);
13. Sekretaris (Inspektorat);
14. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;
15. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
16. Inspektur Investigasi;
17. Sekretaris (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik);
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
19. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan;
20. Sekretaris (Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan);
21. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sda Dan Perekonomian;
22. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian Dan Pengembangan;
23. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
24. Sekretaris (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
25. Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin Dan Kesejahteraan ASN;
26. Kepala Bidang Perencanaan Dan Mutasi Kepegawaian;
27. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
28. Sekretaris (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
29. Kepala Bidang Perbendaharaan;
30. Kepala Bidang Akuntansi;
31. Kepala Bidang Anggaran;
32. Kepala Bidang Pendapatan;
33. Kepala Bidang Pengelolaan Aset;
34. Sekretaris (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan);
35. Kepala Bidang Kearsipan
36. Kepala Bidang Perpustakaan
37. Sekretaris (Dinas kesehatan);
38. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
39. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;

40. Kepala Bidang Pelayanan Dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
41. Sekretaris (Dinas Lingkungan Hidup);
42. Kepala Bidang Perencanaan, Pengaduan, Dan Peningkatan Kapasitas;
43. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan & Limbah Berbahaya Beracun (B3);
44. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
45. Sekretaris (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian);
46. Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
47. Kepala Bidang Pertanian;
48. Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
49. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha Dan Pphp;
50. Sekretaris (Dinas Perikanan);
51. Kabid Budidaya Perikanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
52. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
53. Sekretaris (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);
54. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
55. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
56. Sekretaris (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan);
57. Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
58. Kepala Bidang Pertanahan;
59. Sekretaris (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat);
60. Kepala Bidang Sosial;
61. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
62. Sekretaris (Dinas Pendidikan);
63. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
64. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dan Sarana Prasarana;
65. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
66. Sekretaris (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian);
67. Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
68. Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
69. Kepala Bidang Statistik Dan Persandian;
70. Sekretaris (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja);
71. Kepala Bidang Ketenagakerjaan;
72. Kepala Bidang Perindustrian;
73. Sekretaris (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan);
74. Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
75. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan;
76. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor;
77. Sekretaris (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata);
78. Kepala Bidang Kebudayaan;
79. Kepala Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
80. Kepala Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
81. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata;
82. Sekretaris (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);

83. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
84. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
85. Sekretaris (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
86. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
87. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
88. Sekretaris (Dinas Perhubungan);
89. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Pelayaran;
90. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
91. Sekretaris (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
92. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan;
93. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
94. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
95. Sekretaris (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
96. Kepala Bidang Bina Marga;
97. Kepala Bidang Cipta Karya Dan Penataan Ruang;
98. Kepala Bidang Pengairan Dan Sumber Daya Air;
99. Sekretaris (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
100. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
101. Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;
102. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
103. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
104. Kepala Bagian Tata Usaha (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
105. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dan Penilaian Kinerja (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
106. Kepala Bidang Pelayanan (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
107. Kepala Bidang Penunjang (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
108. Camat Kecamatan Tarakan Barat;
109. Sekretaris Camat Tarakan Barat;
110. Camat Kecamatan Tarakan Tengah;
111. Sekretaris Camat Tarakan Tengah;
112. Camat Kecamatan Tarakan Utara;
113. Sekretaris Camat Tarakan Utara;
114. Camat Kecamatan Tarakan Timur;
115. Sekretaris Camat Tarakan Timur

C. Jabatan Pengawas, meliputi:

1. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (Sekretariat Daerah);
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, Dan Kepegawaian (Sekretariat Daerah);
3. Kepala Sub Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah);
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan (Sekretariat Daerah);
5. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan (Sekretariat Daerah);
6. Kepala Sub Bagian Protokol (Sekretariat Daerah);
7. Kepala Sub Bagian Umum (Sekretariat DPRD);
8. Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan (Sekretariat DPRD);

9. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Inspektorat);
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan (Inspektorat);
11. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Inspektorat);
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan (Inspektorat);
13. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik);
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik);
15. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan);
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan);
17. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
18. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
19. Kepala Sub Bidang Penerimaan Dan Pembiayaan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
20. Kepala Sub Bidang Pengeluaran (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
21. Kepala Sub Bidang Pengolah Data Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
22. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
23. Kepala Sub Bidang Anggaran Dan Penyusunan Apbd (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
24. Kepala Sub Bidang Sistem Penganggaran (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
25. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
26. Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
27. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
28. Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
29. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
30. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
31. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan);
32. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan);
33. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Kesehatan);
34. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Kesehatan);
35. Kepala Instalasi Farmasi Dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan
36. Kesehatan (Dinas Kesehatan);
37. Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Daerah (Dinas Kesehatan);

38. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Lingkungan Hidup);
39. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Lingkungan Hidup);
40. Kepala UPT. TPA Sampah (Dinas Lingkungan Hidup);
41. Kepala Tata Usaha UPT. TPA Sampah (Dinas Lingkungan Hidup);
42. Kepala UPT. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup);
43. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian);
44. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian);
45. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Perikanan);
46. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Perikanan);
47. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);
48. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);
49. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan);
50. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan);
51. Kepala Uptd Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan);
52. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat);
53. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat);
54. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Pendidikan);
55. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Pendidikan);
56. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan);
57. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan);
58. Kepala Seksi Pembinaan Sarana Prasarana (Dinas Pendidikan);
59. Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan (Dinas Pendidikan);
60. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan);
61. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal (Dinas Pendidikan);
62. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian);
63. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian);
64. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Command Center (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian);
65. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tarakan Command Center (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian);
66. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja);
67. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja);

68. Kepala UPT Lembaga Latihan Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja);
69. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan);
70. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan);
71. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata);
72. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata);
73. Kepala Upt. Balai Adat Tidung Dan Budaya Serta Museum Sejarah (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata);
74. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata);
75. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
76. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
77. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
78. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
79. Kepala Seksi Pencegahan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
80. Kepala Seksi Kesiapsiagaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
81. Kepala Seksi Kedaruratan Dan Logistik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
82. Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
83. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Perhubungan);
84. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Perhubungan);
85. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata (Dinas Perhubungan);
86. Kepala Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata (Dinas Perhubungan);
87. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
88. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
89. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
90. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
91. Kepala UPTD Laboratorium Uji Bahan Konstuksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
92. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Uji Bahan Konstuksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
93. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
94. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
95. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);

96. Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
97. Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
98. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
99. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
100. Kepala Seksi Pencegahan, Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
101. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
102. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dan Penilaian Kinerja (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
103. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Akuntansi (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
104. Kepala Seksi Pemasaran Dan Kerjasama (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
105. Kepala Seksi Informasi, Hukum Dan Pengaduan (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
106. Kepala Seksi Pelayanan Medik (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
107. Kepala Seksi Keperawatan Dan Kebidanan (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
108. Kepala Seksi Penunjang Medik (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
109. Kepala Seksi Penunjang Non Medik (Rumah Sakit Umum Kota Tarakan);
110. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Tarakan Barat
111. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Barat
112. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tarakan Barat
113. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat
114. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tarakan Barat
115. Lurah
116. Sekretaris Lurah
117. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan
118. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan
119. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
120. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Tarakan Tengah
121. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Tengah
122. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah
123. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Tengah
124. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tarakan Tengah
125. Lurah
126. Sekretaris Lurah
127. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan
128. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan

129. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
130. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Tarakan Utara
131. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Utara
132. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tarakan Utara
133. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara
134. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tarakan Utara
135. Lurah
136. Sekretaris Lurah
137. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan
138. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan
139. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
140. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Tarakan Timur
141. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Timur
142. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tarakan Timur
143. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Timur
144. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tarakan Timur
145. Lurah
146. Sekretaris Lurah
147. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan
148. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan
149. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIROL

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN
 ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

A. DAFTAR KOMPETENSI MANAJERIAL

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI MANAJERIAL
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Integritas (4) 2. Kerjasama (4) 3. Komunikasi (4) 4. Orientasi pada hasil (4) 5. Pelayanan Publik (4) 6. Pengembangan diri dan orang lain (4) 7. Mengelola perubahan (4) 8. Pengambilan keputusan (4)
2	Administrator	1. Integritas (3) 2. Kerjasama (3) 3. Komunikasi (3) 4. Orientasi pada hasil (3) 5. Pelayanan Publik (3) 6. Pengembangan diri dan orang lain (3) 7. Mengelola Perubahan (3) 8. Pengambilan Keputusan (3)
3	Pengawas	1. Integritas (2) 2. Kerjasama (2) 3. Komunikasi (2) 4. Orientasi pada hasil (2) 5. Pelayanan Publik (2) 6. Pengembangan diri dan orang lain (2) 7. Mengelola Perubahan (2) 8. Pengambilan Keputusan (2)

B. DAFTAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Perekat Bangsa (4)
2	Administrator	Perekat Bangsa (3)
3	Pengawas	Perekat Bangsa (2)

C. DAFTAR KOMPETENSI TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
Sekretariat Daerah		
1	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (4) 2. Perencanaan Pembangunan Daerah (4) 3. Pengelolaan Keuangan Daerah (4) 4. Penyusunan Produk Hukum Daerah (4) 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah (4) 6. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah (4)
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kelembagaan daerah (4) 2. Analisis potensi ekonomi (4) 3. Penataan wilayah pemerintahan (4) 4. Perencanaan penyediaan sarana ekonomi (4) 5. Pemberdayaan masyarakat (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan produk hukum daerah (4) 2. Pemetaan potensi perekonomian daerah (4) 3. Advokasi kebijakan ilmu ekonomi, baik makro maupun mikro (4) 4. Advokasi kebijakan manajemen studi pembangunan (4) 5. Advokasi kebijakan administrasi pemerintahan daerah (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
4	Asisten Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (4) 2. Pengelolaan Keuangan Daerah (4) 3. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan (4) 4. Penyusunan Produk Hukum Daerah (4) 5. Penyusunan Kelembagaan Daerah (4)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan	1. Rekomendasi penyusunan kelembagaan daerah (4) 2. Rekomendasi kebijakan pembentukan perundang-undangan (4) 3. Analisis kebijakan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan (4) 4. Rekomendasi penyusunan produk hukum daerah (4) 5. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Rekomendasi penyusunan kelembagaan daerah (4) 2. Rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan (4) 3. Analisis kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi dan pembangunan (4) 4. Perumusan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan (4) 5. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
7	Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Administrasi Umum	1. Advokasi Kebijakan bidang aparatur, pelayanan publik dan administrasi umum (4) 2. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi umum (4) 3. Perumusan Kebijakan bidang aparatur, pelayanan publik dan administrasi umum (4) 4. Perumusan Kebijakan Bidang Penataan Organisasi Perangkat Daerah (4) 5. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
8	Kepala Bagian Pemerintahan	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
10	Kepala Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi Hukum (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
11	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan Administrasi Pembangunan dan Pengadaan barang dan Jasa (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
13	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan Administrasi Pembangunan dan Pengadaan barang dan Jasa (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (2)
14	Kepala Bagian Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan pengelolaan Organisasi Pemerintahan Daerah (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
15	Kepala Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan administrasi umum pemerintahan (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan Administrasi umum pemerintahan (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (2)
17	Kepala Sub Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan Administrasi umum pemerintahan (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (2)
18	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan Administrasi umum pemerintahan (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (2)
19	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan urusan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
20	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan urusan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (2)
21	Kepala Sub Bagian Protokol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan urusan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia ASN (2)
Sekretariat DPRD		
22	Sekretaris DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah (4) 2. Manajemen sdm (4) 3. Penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum (4) 4. Pengelolaan keuangan daerah (4) 5. Pengelolaan barang milik daerah (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
23	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Manajemen SDM (3) 4. Pengelolaan Keuangan (3) 5. Pengelolaan Aset (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
24	Kepala Bagian Pengkajian Perundang - Undangan dan Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Fasilitasi Kemitraan (3) 4. Advokasi Hukum (3) 5. Pelaksanaan konsultasi Peraturan Perundang-undangan (3) 6. Pengelolaan teknis penyelenggaraan persidangan (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
25	Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Pelaksanaan Fasilitasi Anggaran (3) 3. Pengkajian dan penelitian Teknis Penyusunan Anggaran (3) 4. Manajemen SDM (3) 5. Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Anggaran (3) 6. Pembinaan Strategi komunikasi Penyusunan Anggaran (3)
26	Kepala Sub Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
27	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Inspektorat		
28	Inspektur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan pengawasan internal pemerintah (4) 2. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (4) 3. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah (4) 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan (4) 5. Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
29	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
30	Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Audit (3) 4. Advokasi Hukum (3) 5. Reviu Dan Evaluasi (3) 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (3)
31	Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Audit (3) 4. Advokasi Hukum (3) 5. Reviu Dan Evaluasi (3) 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (3)
32	Inspektur Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Audit (3) 4. Advokasi Hukum (3) 5. Reviu Dan Evaluasi (3) 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (3)
33	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
34	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
35	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (4) 2. Pengembangan Nilai- Nilai kebangsaan (4) 3. Penguatan Kewaspadaan Nasional (4) 4. Pengembangan Budaya Politik (4) 5. Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Wawasan Kebangsaan (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
36	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
37	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang politik dalam negeri, bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan perencanaan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang politik dalam negeri, bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (3) 5. Pelaksanaan teknis pembinaan politik dan pemilu serta organisasi kemasyarakatan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang politik dalam negeri, bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
38	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Pengelolaan teknis Kewaspadaan Nasional, Penanganan Konflik Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Sosial Budaya, serta Organisasi Kemasyarakatan (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan (3) 5. Manajemen Organisasi (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan (3)
39	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
40	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
41	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (4) 2. Perencanaan Pembangunan Daerah (4) 3. Penyusunan RPJM/RPJP dan RRT (4) 4. Pengembangan Fasilitas dan Inovasi Daerah (4) 5. Pengelolaan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
42	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
43	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Fasilitasi Kemitraan (3) 4. Manajemen Investasi Infrastruktur dan perekonomian (3) 5. Pembinaan penilaian kinerja (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
44	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan Perencanaan Daerah (3) 3. Penyusunan perencanaan Keuangan Daerah (3) 4. Manajemen SDM (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan (3)
45	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Manajemen SDM (3) 4. Manajemen Pemerintahan umum (3) 5. Pengelolaan Pelayanan Publik (3) 6. Penyusunan rencana pembangunan SDM (3)
46	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
47	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
48	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (4) 2. Manajemen SDM Aparatur (4) 3. Manajemen Pelatihan (4) 4. Perencanaan Pengembangan Kompetensi (4) 5. Manajemen Kinerja ASN (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
49	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
50	Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan Asn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan rencana pengembangan Karier (3) 5. Pembinaan penilaian kinerja (3) 6. Pengelolaan teknis kesejahteraan sumber daya manusia ASN (3)
51	Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 4. Pengelolaan teknis pengadaan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan jabatan sumber daya manusia ASN (3) 6. Pengelolaan teknis pensiun pegawai negeri sipil dan/atau pejabat negara (3)
52	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia ASN (3) 4. Pengelolaan standardisasi Jabatan fungsional bidang sumber daya manusia ASN (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
53	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
54	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
55	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (4) 2. Penyusunan Rancangan APBD (4) 3. Pengelolaan Barang Milik Negara (Aset Daerah) (4) 4. Pengelolaan Keuangan Daerah (4) 5. Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
56	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
57	Kepala Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan Laporan Keuangan (3) 4. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (3) 5. Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
58	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah (2) 4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran (2) 5. Penyusunan Laporan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran (2)
59	Kepala Sub Bidang Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah (2) 4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran (2) 5. Penyusunan Laporan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran (2)
60	Kepala Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan perencanaan Keuangan Daerah (3) 4. Pengelolaan teknis Penatausahaan keuangan daerah (3) 5. Penyusunan Laporan Keuangan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sistem Akuntansi Keuangan (3)
61	Kepala Sub Bidang Pengolah Data Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan teknis Penatausahaan keuangan daerah (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Penyusunan Data Keuangan Daerah (2)
62	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan teknis Penatausahaan keuangan daerah (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Penyusunan Data Keuangan Daerah (2)
63	Kepala Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan Program dan Anggaran tahunan (3) 4. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		5. Pembinaan Teknis Penyusunan Anggaran (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis penganggaran (3)
64	Kepala Sub Bidang Anggaran dan Penyusunan APBD	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (2) 4. Pembinaan Teknis Penyusunan Anggaran (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis penganggaran (2)
65	Kepala Sub Bidang Sistem Penganggaran	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (2) 4. Pembinaan Teknis Penyusunan Anggaran (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis penganggaran (2)
66	Kepala Bidang Pendapatan	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan (3) 4. Penyusunan Laporan Kegiatan (3) 5. Pembinaan Teknis pendapatan daerah (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis penganggaran (3)
67	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan (2) 4. Penyusunan Laporan Kegiatan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pendapatan daerah (2)
68	Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan (2) 4. Penyusunan Laporan Kegiatan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pendapatan daerah (2)
69	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		4. Pengelolaan Aset (3) 5. Penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan aset (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan Aset (3)
70	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan Aset (2) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan aset (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan Aset (2)
71	Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan Aset (2) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan aset (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan Aset (2)
72	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
73	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
74	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan (4) 2. Pengelolaan Perpustakaan (4) 3. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kun (4) 4. Pengelolaan Arsip (4) 5. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
75	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
76	Kepala Bidang Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Manajemen Arsip(3) 5. Penyelenggaraan Persuratan dan Kearsipan (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
77	Kepala Bidang Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan Perencanaan Daerah (3) 3. Perumusan Kebijakan Perpustakaan Daerah (3) 4. Manajemen Perpustakaan (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
78	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
79	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Kesehatan		
80	Kepala Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan bidang kesehatan (4) 2. Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (4) 3. Analisis kelayakan izin pendirian rumah sakit dan fasilitas kesehatan (4) 4. Analisis kelayakan izin farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (4) 5. Perencanaan sdm tenaga kesehatan (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
81	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia asn (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia asn (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia asn (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia asn (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia asn (3) 6. Penyelenggaraan urusan kepegawaian (3)
82	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan Sumber Daya Ketahanan Pangan (3) 4. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (3) 5. Pembinaan Jabatan fungsional bidang kesehatan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia (3)
83	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Aplikasi Informasi Daerah (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (3) 5. Pembinaan Jabatan fungsional bidang kesehatan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
84	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Perumusan kebijakan Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (3) 5. Pengelolaan teknis pelayanan kesehatan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia (3)
85	Kepala Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Kerumahtanggaan (2) 4. Pengelolaan teknis Farmasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian instalasi Farmasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (2)
86	Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan teknis laboratorium (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Layanan Sarana Pengujian Laboratorium (2)
87	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
88	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
Dinas Lingkungan Hidup		
89	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan pelestarian lingkungan hidup (4) 2. Pengelolaan persampahan (4) 3. Analisis dampak lingkungan (4) 4. Analisis kelayakan izin lingkungan dan pph (4) 5. Manajemen pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
90	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
91	Kepala Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Peningkatan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan Sumber Daya Ketahanan Pangan (3) 4. Pengelolaan teknis Pengaduan (3) 5. Penyusunan Rencana Peningkatan Kapasitas (3) 6. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3)
92	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan & Limbah Berbahaya Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pertanian (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Pengelolaan teknis Sampah dan Limbah berbahaya (3) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Limbah berbahaya beracun (B3) (3) 6. Pengelolaan standarisasi pengendalian Limbah berbahaya beracun (B3) (3)
93	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Penyusunan Rencana Strategis (3) 3. Pengelolaan teknis Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (3) 4. Pengelolaan pengawasan, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		5. Penyusunan perencanaan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (3) 6. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3)
94	Kepala UPT. TPA Sampah	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pelaksanaan Penanganan Sampah (2) 5. Pengelolaan teknis sampah (2)
95	Kepala Tata Usaha UPT. TPA Sampah	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
96	Kepala UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Manajemen Laboratorium (2) 4. Pengelolaan Laboratorium (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
97	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
98	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
99	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan Bidang Ketahanan pangan dan Pertanian (4) 2. Analisis Kelayakan Izin Usaha Pertanian (4) 3. Pengendalian dan penanggulangan hama serta bencana pertanian (4) 4. Pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian (4) 5. Peningkatan produksi pangan dan pertanian (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
100	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
101	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan Sumber Daya Ketahanan Pangan (3) 4. Fasilitasi Kemitraan (3) 5. Pembinaan sumber daya manusia bidang ketahanan pangan (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia bidang ketahanan pangan (3)
102	Kepala Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pertanian (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Manajemen SDM Pertanian (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pengelolaan Hasil Pertanian (3)
103	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Peternakan dan Kesehatan hewan (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Manajemen SDM Peternakan dan Kesehatan hewan (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pengelolaan Hasil Peternakan dan Kesehatan hewan (3)
104	Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Manajemen SDM Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pengelolaan teknis Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP (3)
105	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
106	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Perikanan		
107	Dinas Perikanan	1. Advokasi Kebijakan bidang perikanan (4) 2. Pengelolaan tempat pelayanan ikan (4) 3. Pemetaan potensi perikanan (4) 4. Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan (4) 5. Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah(4)
108	Sekretaris	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
109	Kepala Bidang Budidaya Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Budidaya Perikanan (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan perencanaan Budidaya Perikanan (3) 5. Pengelolaan teknis budidaya perikanan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis budidaya perikanan (3)
110	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Perikanan Tangkap (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan perencanaan Kegiatan Perikanan Tangkap (3) 5. Pengelolaan teknis perikanan tangkap (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Perikanan Tangkap (3)
111	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
112	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
113	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (4) 2. Pengendalian penduduk (4) 3. Pengelolaan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana (4) 4. Pemberdayaan perempuan (4) 5. Perlindungan anak (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
114	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
115	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan teknis pemberdayaan masyarakat (3) 4. Pengelolaan teknis perlindungan anak (3) 5. Penyelenggaraan pembinaan teknis (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
116	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan teknis pelaksanaan pengendalian penduduk (3) 5. Pengelolaan teknis program keluarga berencana dan keluarga sejahtera (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
117	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
118	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
Dinas Peumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan		
119	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan pembangun perumahan (4) 2. Perencanaan pembangunan kawasan permukiman (4) 3. Pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan (4) 4. Advokasi kebijakan bidang pertanahan (4) 5. Analis kelayakan pembangunan kawasan dan pendirian bangunan (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
120	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
121	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Kajian Kebijakan Perumahan (3) 4. Pengelolaan teknis wilayah perumahan dan Kawasan permukiman (3) 5. Manajemen Proyek (3) 6. Manajemen Investasi Infrastruktur (3)
122	Kepala Bidang Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan teknis pertanahan (3) 4. Pengkajian dan penelitian pemanfaatan tanah (3) 5. Advokasi pertanahan (3) 6. Penyusunan standarisasi pertanahan (3)
123	Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan Aset (2) 4. Penyusunan standarisasi penghuni Rusunawa dan Rusus (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
124	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
125	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
126	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan Kesejahteraan Sosial (4) 2. Manajemen Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (4) 3. Pemetaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (4) 4. Manajemen Rehabilitasi Sosial (4) 5. Analisis Kelayakan Izin Sumbangan Sosial (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
127	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3.)pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
128	Kepala Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia (3) 6. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
129	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
130	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
131	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas pendidikan		
132	Kepala Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan bidang Pendidikan (4) 2. Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (4) 3. Perencanaan SDM Pendidik dan Kependidikan dan Pemenuhannya (4) 4. Manajemen Pendidikan (4) 5. Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4) 7. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
133	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
134	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Pendidikan dasar (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan perencanaan operasional Pendidikan dasar (3) 5. Pengelolaan standarisasi Pendidikan dasar (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis Pendidikan dasar (3)
135	Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan perencanaan operasional Pendidikan dasar (2) 4. Pengelolaan standarisasi Pendidikan dasar (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis Pendidikan dasar (2)
136	Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan perencanaan operasional Pendidikan dasar (2) 4. Pengelolaan standarisasi Pendidikan dasar (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis Pendidikan dasar (2)
137	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dan Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Pendidikan dasar (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penilaian kompetensi/potensi Tenaga Kependidikan (3) 5. Pengelolaan teknis Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana (3)
138	Kepala Seksi Pembinaan Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penilaian kompetensi/potensi Tenaga Kependidikan (2) 4. Pengelolaan teknis Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
139	Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penilaian kompetensi/potensi Tenaga Kependidikan (2) 4. Pengelolaan teknis Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana (2)
140	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan standardisasi Pendidikan usia dini dan non formal (3) 5. Pengelolaan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak usia dini dan non formal (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Anak usia dini dan non formal (3)
141	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan standardisasi Pendidikan usia dini dan non formal (2) 4. Pengelolaan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak usia dini dan non formal (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Anak usia dini dan non formal (2)
142	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan standardisasi Pendidikan usia dini dan non formal (2) 4. Pengelolaan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak usia dini dan non formal (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Anak usia dini dan non formal (2)
143	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
144	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
145	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian (4) 2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (4) 3. Pengelolaan Teknologi dan Informatika (4) 4. Manajemen layanan teknologi informasi (4) 5. Pengamanan Informasi (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
146	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3.)pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
147	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3) 4. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (3) 5. Pengelolaan opini dan aspirasi publik (3) 6. Pengelolaan media komunikasi publik (3)
148	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Aplikasi Informasi Daerah (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Pengelolaan Sistem Aplikasi Informatika (3) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian konten aplikasi informatika (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
149	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Aplikasi Informasi Daerah (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Pengelolaan Sistem Aplikasi Informatika (3) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian konten aplikasi informatika (3)
150	Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Command Center	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Fasilitas Kemitraan (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pengelolaan pelayanan informasi publik (2)
151	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPI'D Tarakan Command Center	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
152	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
153	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
154	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian (4) 2. Analisis Kelayakan Izin IUI Kecil dan Menengah (4) 3. Pelatihan dan produktivitas Tenaga kerja (4) 4. Hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (4)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		5. Perencanaan Pembangunan Industri (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
155	Sekretaris	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
156	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Advokasi Hukum (3) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 5. Pembinaan sumber daya manusia (3) 6. Fasilitas Kemitraan (3)
157	Kepala UPT Lembaga Latihan Kerja	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Fasilitas Kemitraan (2) 4. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan (2) 5. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 6. Pengembangan Sistem dan Teknik Pelatihan (2)
158	Kepala Bidang Perindustrian	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian usaha (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (3)
159	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
160	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan		
161	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (4) 2. Perencanaan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (4) 3. Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (4) 4. Analisis Kelayakan Perizinan dan Pendaftaran Usaha (4) 5. Pengeawasan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
162	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 1. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 5. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
163	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Manajemen Koperasi (3) 5. Pengelolaan teknis usaha (3) 6. Fasilitasi Kemitraan (3)
164	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan Perencanaan Daerah (3) 3. Penyusunan rencana pengembangan perdagangan (3) 4. Pelaksanaan pengembangan perdagangan (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian perdagangan (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
165	Kepala Bidang Pengembangan Ekspor	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Fasilitas Kemitraan (3) 4. Jaminan Mutu (3) 5. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kualitas (3)
166	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
167	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dians Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata		
168	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1. Advokasi kebijakan Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (4) 2. Pembinaan kesenian dan pengelolaan cagar budaya (4) 3. Pembinaan karakter kepemudaan (4) 4. Pembinaan keolahragaan (4) 5. Pemasaran pariwisata (4) 6. Promosi dan Pembudayaan Olahraga (4) 7. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah (4)
169	Sekretaris	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
170	Kepala Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan perencanaan kebudayaan (3) 4. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 5. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (3) 6. Pembinaan sumber daya manusia (3)
171	Kepala Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian usaha (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (3)
172	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan perencanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga (3) 4. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 5. Pengelolaan teknis kegiatan kepemudaan dan olahraga (3) 6. Pembinaan sumber daya manusia (3)
173	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian usaha (3) 5. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan (3) 6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (3)
174	Kepala UPT. Balai Adat Tidung dan Budaya Serta Museum Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan rumah budaya dan museum (2) 4. Pengkajian dan penelitian benda sejarah (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian rumah budaya dan museum (2)
175	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
176	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
177	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
178	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Advokasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4) 2. Teknik Tata Kelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk (4) 3. Teknik Tata Kelola Pelayanan Pencatatan Sipil (4) 4. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (4) 5. Pengelolaan data kependudukan (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
179	Sekretaris	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2.)advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
180	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan Pelayanan Publik (3) 5. Pengelolaan Data dan Informasi (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
181	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan Perencanaan Daerah (3) 3. Pengelolaan sistem informasi Kependudukan (3) 4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sistem Informasi (3) 5. Pengelolaan Pelayanan Publik (3) 6. Pembinaan Sumber Daya Manusia (3)
182	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
183	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
184	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (4) 2. Pemetaan Potensi Kerawanan Bencana (4) 3. Penanganan Darurat (4) 4. Pengelolaan Distribusi Logistik (4) 5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi (4) 6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah (4)
185	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
186	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan perencanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (3) 5. Pengelolaan standardisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (3)
187	Kepala Seksi Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan perencanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (2) 4. Pengelolaan standardisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (2)
188	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan perencanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (2) 4. Pengelolaan standardisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (2)
189	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (3) 5. Pengelolaan teknis kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (3)
190	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		3. Penyusunan perencanaan kebutuhan kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (2) 4. Pengelolaan teknis kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (2)
191	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan perencanaan kebutuhan kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (2) 4. Pengelolaan teknis kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah (2)
192	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
193	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Perhubungan		
194	Kepala Dinas Perhubungan	1. Advokasi kebijakan lalu lintas angkutan jalan (4) 2. Manajemen lalu lintas angkutan jalan (4) 3. Penyusunan rencana induk jaringan llaj (4) 4. Audit keselamatan llaj (4) 5. Analisis kelayakan trayek angkutan umum, taksi, angkutan barang dan kendaraan bermotor (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
195	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
196	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3) 4. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (3) 5. Penyusunan Rencana Peningkatan Kapasitas (3) 6. Penyelenggaraan Pengembangan Kemitraan (3)
197	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (3) 3. Penyusunan Rencana Strategis (3) 4. Pengelolaan Teknis Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (3) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian izin penyelenggaraan angkutan (3) 6. Pengelolaan standardisasi Angkutan Jalan Wilayah (3)
198	Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Laut (2) 4. Pengelolaan Teknis Penyeberangan orang dan barang (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian izin penyelenggaraan angkutan (2)
199	Kepala Tata Usaha Uptd Pelabuhan Penyeberangan Juata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
200	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
201	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
202	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Advokasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal (4) 2. Teknik promosi penanaman modal (4) 3. Tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu (4) 4. Analisis kelayakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (4) 5. Teknik pengendalian pelaksanaan penanaman modal (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
203	Sekretaris	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
204	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pelaksanaan konsultasi dan pengelolaan pengaduan (3) 4. Pengelolaan data dan sistem informasi (3) 5. Pengelolaan standardisasi Produk Layanan (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
205	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyusunan rencana pengembangan Iklim Usaha (3) 5. Pengelolaan teknis pelaksanaan promosi dan penanaman modal (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
206	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Penyelenggaraan Administrasi perizinan dan non perizinan (3) 5. Pengelolaan teknis perizinan dan non perizinan (3) 6. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
207	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
208	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
209	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi kebijakan pembangunan infrastruktur (4) 2. Teknik perencanaan dan pengendalian tata ruang (4) 3. Rancang bangun infrastruktur sumber daya air dan saluran drainase (4) 4. Rancang bangun infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan pelengkap (4) 5. Analisis kelayakan ijin usaha pembangunan infrastruktur (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
210	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
211	Kepala Bidang Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project) (3) 4. Pengkajian dan penelitian infrastruktur jalan dan jembatan (3) 5. pengelolaan standardisasi pembangunan jalan dan jembatan (3) 6. pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan bina marga (3)
212	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan teknis penataan dan pembangunan gedung (3) 4. Pengelolaan standardisasi teknis penataan dan pembangunan gedung (3) 5. Pengkajian dan penelitian penataan ruang dan pembangunan gedung (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Cipta Karya dan Penataan Ruang (3)
213	Kepala Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Perumusan kebijakan Aplikasi Informasi Daerah (3) 3. Penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya air (3) 4. Pengelolaan Sistem drainase wilayah (3) 5. Pengelolaan standardisasi teknis pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (3)
214	Kepala UPTD Laboratorium Uji Bahan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Fasilitasi Kemitraan (2) 4. Pengkajian dan penelitian Bahan Konstruksi (2) 5. Layanan Sarana Pengujian Laboratorium (2)
215	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upi'd Laboratorium Uji Bahan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
216	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
217	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
218	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian ketertiban umum (4) 2. Penanganan dan pengendalian kebakaran (4) 3. Pemetaan potensi kerawanan pelanggaran ketertiban umum (4) 4. Pemetaan potensi bahaya kebakaran (4) 5. Penyuluhan pencegahan kebakaran dan pelanggaran ketertiban (4) 6. Advokasi kebijakan otonomi daerah (4)
219	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 6. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (3)
220	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan teknis penegakan peraturan (3) 5. Penyusunan standardisasi sistem pengamanan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penegakkan peraturan (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
221	Kasie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan teknis penegakan peraturan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penegakkan peraturan (2)
222	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (2) 4. Pengelolaan teknis penegakan peraturan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penegakkan peraturan (2)
223	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (3) 5. Pengelolaan teknis perlindungan masyarakat (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (3)
224	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (2) 4. Pengelolaan teknis perlindungan Masyarakat (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (2)
225	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (2) 4. Pengelolaan teknis perlindungan Masyarakat (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
226	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3) 4. Pengelolaan standardisasi Pemadaman kebakaran (3) 5. Pembinaan Jabatan fungsional (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pemadaman kebakaran (3)
227	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan standardisasi Pemadaman kebakaran (2) 4. Pembinaan Jabatan fungsional (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pemadaman kebakaran (2)
228	Kepala Seksi Pencegahan, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan standardisasi Pemadaman kebakaran (2) 4. Pembinaan Jabatan fungsional (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian teknis pemadaman kebakaran (2)
229	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
230	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
Rumah Sakit Umum Kota Tarakan		
231	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (4) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (4) 3. Manajemen Rumah Sakit (4) 4. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3) 5. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (3)
232	Kepala Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia ASN (2) 4. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (2) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ASN (2)
233	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
234	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penilaian Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Pembinaan penilaian kinerja (2) 5. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN (2)
235	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
236	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Penilaian Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		4. Pembinaan kehumasan (3) 5. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian bidang hubungan masyarakat dan penilaian kinerja (3)
237	Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pembinaan kehumasan (2) 4. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian bidang hubungan masyarakat dan penilaian kinerja (2)
238	Kepala Seksi Informasi, Hukum dan Pengaduan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pembinaan kehumasan (2) 4. Pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian bidang hubungan masyarakat dan penilaian kinerja (2)
239	Kepala Bidang Pelayanan	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Pembinaan Jabatan fungsional (3) 4. Pengelolaan standardisasi pelayanan kesehatan (3) 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (3)
240	Kepala Seksi Pelayanan Medik	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pembinaan Jabatan fungsional (2) 4. Pengelolaan standardisasi pelayanan kesehatan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (2)
241	Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pembinaan Jabatan fungsional (2) 4. Pengelolaan standardisasi pelayanan kesehatan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
		5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (2)
242	Kepala Bidang Penunjang	1. Perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas penunjang (3) 4. Pengelolaan standardisasi pelayanan kesehatan (3) 5. Pengelolaan teknis penunjang pelayanan (3) 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (3)
243	Kepala Seksi Penunjang Medik	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas penunjang (2) 4. Pengelolaan teknis penunjang pelayanan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (2)
244	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas penunjang (2) 4. Pengelolaan teknis penunjang pelayanan (2) 5. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (2)
Kecamatan		
245	Camat	1. Manajemen SDM (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat (3) 4. Manajemen Pemerintahan umum (3) 5. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (3)
246	Sekretaris Camat	1. Manajemen SDM (3) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (3) 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat (3) 4. Manajemen Pemerintahan umum (3) 5. Manajemen Kerumahtanggaan (3)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
247	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Teknis Perencanaan (2) 4. Penyusunan Laporan Keuangan (2) 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK) (2)
248	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian (2) 4. Pengelolaan Aset (2) 5. Pengelolaan Barang Persediaan (2)
249	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Manajemen Pemerintahan umum (2) 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)
250	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan ketentraman dan Ketertiban Umum (2) 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)
251	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2) 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)
Kelurahan		
252	Lurah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat (2) 4. Manajemen Pemerintahan umum (2) 5. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI TEKNIS
253	Sekretaris Lurah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat (2) 4. Manajemen Pemerintahan umum (2) 5. Manajemen Kerumahtanggaan (2)
254	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Manajemen Pemerintahan umum (2) 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)
255	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pengelolaan ketentraman dan Ketertiban Umum (2) 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)
256	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. Advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2) 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)
257	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM (2) 2. advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia ASN (2) 3. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2) 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan (2)


 WALI KOTA TARAKAN,
 KHAIRUL